

**BALAI PENGAMANAN
FASILITAS KESEHATAN
SURABAYA**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kesehatan RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surabaya, Januari 2024
Kepala BPFK Surabaya



Dr. Wahyudi Ifani, ST, M.Si
NIP. 197211181999031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
PernyataanTanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	33
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	55
F. Pengungkapan Penting Lainnya	59
VI. Lampiran dan Daftar	

BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA


JL. KARANGMENJANGAN NO. 22 SURABAYA JAWA TIMUR
TELEPON 031 5035830,5014638, FAXIMILE 0315021002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surabaya, Januari 2024
Kepala BPFK Surabaya



Dr. Wakyudi Ifani, ST, M.Si
NIP 197211181999031003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp18.538.565.461 atau mencapai 195,14 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp9.500.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp34.624.274.322 atau mencapai 94,33 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp36.705.261.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Tahun anggaran 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp33.682.144.422 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp807.595.192; Aset Tetap (neto) sebesar Rp32.874.549.230; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp47.097.867 dan Rp33.635.046.555.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.742.957.734, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp29.928.018.226 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp12.185.060.492). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus/(Defisit) Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar

Rp53.979.627 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp12.131.080.865).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp29.680.418.559 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp12.131.080.865) ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp16.085.708.861 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 202 adalah senilai Rp33.635.046.555.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	9.500.000.000	18.538.565.461	195,14	18.770.861.724
JUMLAH PENDAPATAN		9.500.000.000	18.538.565.461	195,14	18.770.861.724
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	10.974.903.000	10.894.606.354	99,27	10.897.768.188
Belanja Barang	B.4	14.856.324.000	12.972.378.726	87,32	11.386.839.704
Belanja Modal	B.5	10.874.034.000	10.757.289.242	98,93	7.836.533.411
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		36.705.261.000	34.624.274.322	94,33	30.121.141.303

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	238.625.568
Piutang Bukan Pajak	C.4	664.353.500	1.405.981.600
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.5	(664.353.500)	(644.375.795)
Persediaan	C.6	807.595.192	722.618.353
Jumlah Aset Lancar		807.595.192	1.722.849.726
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.7	93.749.850.037	83.284.048.534
Gedung dan Bangunan	C.8	9.743.982.390	9.743.982.390
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.9	67.500.000	67.500.000
Aset Tetap Lainnya	C.10	298.284.814	268.192.825
Konstruksi dalam pengerjaan	C.11	599.772.000	599.772.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.12	(71.584.840.011)	(65.722.531.807)
Jumlah Aset Tetap		32.874.549.230	28.240.963.942
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.13	936.077.202	936.077.202
Aset Lain-Lain	C.14	330.424.510	69.028.760
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.15	(1.266.501.712)	(1.005.105.962)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		33.682.144.422	29.963.813.668
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.16	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.17	47.097.867	283.395.109
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		47.097.867	283.395.109
JUMLAH KEWAJIBAN		47.097.867	283.395.109
EKUITAS			
Ekuitas	C.18	33.635.046.555	29.680.418.559
JUMLAH EKUITAS		33.635.046.555	29.680.418.559
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		33.682.144.422	29.963.813.668

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	17.742.957.734	18.503.968.827
JUMLAH PENDAPATAN		17.742.957.734	18.503.968.827
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	10.894.606.354	10.897.768.188
Beban Persediaan	D.3	521.548.362	376.299.918
Beban Barang dan Jasa	D.4	5.017.476.728	4.583.350.877
Beban Pemeliharaan	D.5	2.068.578.805	1.738.880.143
Beban Perjalanan Dinas	D.6	5.282.126.318	4.586.014.899
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	6.123.703.954	5.281.630.168
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	19.977.705	80.681.278
JUMLAH BEBAN		29.928.018.226	27.544.625.471
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(12.185.060.492)	(9.040.656.644)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	108.055.564
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	108.055.564
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka panjang		-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka panjang		-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka panjang		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		53.979.627	20.635.833
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		53.979.627	20.635.833
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		53.979.627	128.691.397
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(12.131.080.865)	(8.911.965.247)
POS LUAR BIASA	D.12		
Beban Luar Biasa		-	-
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(12.131.080.865)	(8.911.965.247)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1	29.680.418.559	27.230.439.111
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(12.131.080.865)	(8.911.965.247)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	11.665.116
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	-	11.665.116
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	-	-
JUMLAH		17.549.337.694	18.330.138.980
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	16.085.708.861	11.350.279.579
EKUITAS AKHIR	E.5	33.635.046.555	29.680.418.559

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya

Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya sebagai satuan kerja dibawah Eselon 1 Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI mempunyai

1. VISI BPFK Surabaya

“Menjadi Lembaga Pengamanan Fasilitas Kesehatan Berstandar Internasional”

2. MISI BPFK Surabaya

- 1. Menyediakan layanan yang bermutu , terpercaya dan inovatif dalam bidang inspeksi, pengujian, kalibrasi dan sertifikat fasilitas kesehatan;
- 2. Mewujudkan fasilitas kesehatan yang aman;
- 3. Menjamin mutu dan penapisan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan;
- 4. Memperkuat kemitraan dalam pengelolaan mutu alat kesehatan di tingkat regional.

3. TUJUAN BPFK Surabaya

- 1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi
- 2. Meningkatkan keamanan dan keselamatan penggunaan alat kesehatan Radiasi dan Non Radiasi
- 3. Meningkatkan kualitas SDM
- 4. Meningkatkan pengelolaan yang mandiri, akuntabel dan independen.

4. SASARAN STRATEGIS BPFK Surabaya

- a. Tercapainya pelayanan prima, cepat, tepat dan akurat dan ramah serta pola tariff yang menarik.
- b. Tercapainya target pelayanan di bidang pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana serta monitoring radiasi perorangan.
- c. Tercapainya peningkatan cakupan wilayah dan kecepatan pelayanan.
- d. Tercapainya pengamanan peralatan kesehatan pre market.
- e. Terselenggaranya jejaring rujukan regional, nasional dan internasional.
- f. Tercapainya keamanan dan keselamatan penggunaan alat kesehatan Radiasi dan Non radiasi di sarpelkes.
- g. Terselenggaranya program inti manajemen.
- h. Terciptanya produk pelayanan yang bermutu dengan biaya terjangkau dan kompetitif.
- i. Terwujudnya akuntabilitas wajar tanpa pengecualian.
- j. Tercapainya penilaian yang obyektif terkait mutu dan keamanan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan.

5. STRATEGI MENCAPAI SASARAN STRATEGIS BPFK Surabaya

- a. Pelayanan prima
- b. Peningkatan utilisasi sarana prasarana dan peralatan pengujian dan kalibrasi
- c. Inovasi, serta diferensiasi dan diversifikasi

layanan.

- d. Peningkatan peran jejaring laboratorium.
- e. Pembinaan proaktif ke seluruh stake holder di wilayah binaan.
- f. Penyelenggaraan manajemen SDM yang professional.
- g. Sistem informasi elektronik
- h. Kemandirian dan akuntabilitas organisasi dalam melaksanakan operasional pelayanan melalui BLU.
- i. Independensi organisasi dalam melaksanakan operasional pelayanannya.

6. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPFK Surabaya

Berdasarkan :

1. UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit,
2. Permenkes No. 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
3. Permenkes No. 9 Tahun 2014 Tentang Klinik

BPFK Surabaya merupakan Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang berwenang untuk melakukan pengamanan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.
- Pengendalian mutu dan pengembangan teknologi
- Inspeksi sarana dan prasarana kesehatan
- Pengamanan dan pengukuran paparan radiasi
- Monitoring dosis radiasi personal
- Pengukuran luaran radiasi terapi
- Monitoring dan Evaluasi

- Advokasi dan bimbingan teknis

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas

atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

1. Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

2. Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah

pelatihan selesai dilaksanakan

- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang

- mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan

jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut

diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset
Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai

tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan

dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 11 kali dari DIPA awal. Hal ini disebabkan adanya:

- 1. Revisi Tagging Automatic Adjustment- Rekalibrasi;
- 2. Buka Blokir AADB;
- 3. Rev Hal III DIPA Rencana Penarikan Dana;
- 4. Pemutakhiran KPA;
- 5. Refocusing Perjalanan Dinas Pimpinan;
- 6. Refocusing Rekalibrasi;
- 7. Pemanfaatan Sisa Kontrak Alat Pengujian dan Kalibrasi (Sisa Gaji Pokok PNS, Uang Makan PNS dan TUKIN);
- 8. Penambahan Anggaran Rp.8.524.117.000 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengujian dan Kalibrasi;
- 9. Pemutakhiran Data POK Kewenangan KPA.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	9.500.000.000	9.500.000.000
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	9.500.000.000	9.500.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	10.974.903.000	10.974.903.000
Belanja Barang	15.364.099.000	14.856.324.000
Belanja Modal	2.349.917.000	10.874.034.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	28.688.919.000	36.705.261.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp18.538.565.
461*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp18.538.565.461 atau mencapai 195,14 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp9.500.000.000. Pendapatan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya terdiri dari:

1. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan standardisasi di Bidang Kesehatan sebesar Rp18.476.234.110.
2. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp7.832.724. Pendapatan ini adalah Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pemerintah, yang terdiri dari :
 - a. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari PT Aksa Jaya Sentosa untuk pengadaan alat pengujian dan kalibrasi sebesar Rp391.500 (Denda disetor ke kas negara melalui potongan SPM No. 302 Tgl 27 Juli 2023 SP2D No. 231351301012100 Tanggal 31 Juli 2023).
 - b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari PT Aksa Jaya Sentosa untuk pengadaan alat pengujian dan kalibrasi sebesar Rp1.890.000 (Denda disetor ke kas negara melalui potongan SPM No. 306 Tgl 31 Juli 2023 SP2D No. 231351301012207 Tanggal 03 Agustus 2023).
 - c. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari PT Sartotech Indonesia untuk Pengadaan Alat Pengujian Dan Kalibrasi (Anak Timbangan) sebesar Rp 5.551.224 (Denda disetor ke kas negara melalui potongan SPM No. 688 Tgl 28 Desember 2023 SP2D No. 239991301000128 Tanggal 29 Desember 2023).
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp45.729.627. Penerimaan tersebut terdiri dari:
 - a. Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2022 untuk 25 Pegawai sebesar Rp2.350.859,- (disetor ke negara berdasarkan billing Simponi nomor 820230214302466 dan NTPN Nomor 9875261QUQBJBEO2 Tanggal 14 Februari 2023).
 - b. Pengembalian Gaji Induk bln.Agust-Des 2022,

Tukin Bulan Agust-Des 2022 dan Uang Makan Bulan Agust-Nov 2022 a.n. Muhammad Hafidh Amaly, Amd (PNS) sebesar Rp43.378.768,- (disetor ke negara berdasarkan billing Simponi nomor 820230302035491 dan NTPN Nomor E9C541JNFLI8VRH3 Tanggal 02 Maret 2023).

4. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp8.250.000 merupakan penerimaan yang berasal dari pengembalian Lebih Bayar Pengadaan Lisensi Microsoft Office TA 2022 (disetor ke negara berdasarkan billing Simponi nomor 820231212012645 dan NTPN Nomor 23A4D55DF0MUE535 Tanggal 13 Desember 2023).
5. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp519.000 merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan sewa rumah dinas yang terdiri :
 - a. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Juni-Juli 2023 sebesar Rp173.000 (disetor ke negara berdasarkan billing Simponi nomor 820230706239844 dan NTPN Nomor 7F11C48VV5LFM6B4 Tanggal 07 Juli 2023).
 - b. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Agustus 2023 sebesar Rp86.500 (disetor ke negara berdasarkan billing Simponi nomor 820230807846584 dan NTPN Nomor 423EE48VV5OGIVLO Tanggal 07 Agustus 2023).
 - c. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Oktober 2023 sebesar Rp86.500 (disetor ke negara berdasarkan billing Simponi nomor 820231003396745 dan NTPN Nomor 3B42F55DF0GNFMK9 Tanggal 04 Oktober 2023).
 - d. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Desember 2023 sebesar Rp86.500 (disetor ke negara berdasarkan billing Simponi nomor 820231208476629 dan NTPN Nomor

9079C3CIFBI287UL Tanggal 08 Desember 2023).

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2023

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN 2023		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	519.000	-
2	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan standardisasi di Bidang Kesehatan	9.500.000.000	18.476.234.110	194,49
3	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	7.832.724	-
4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	45.729.627	-
5	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	8.250.000	-
Jumlah		9.500.000.000	18.538.565.461	195,14

Realisasi Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 1,24% persen dibandingkan Tahun Anggaran 2022.

Perbandingan Realisasi Pendapatan
TA 2023 dan TA 2022

No	URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	108.055.564	-100,00
2	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan standardisasi di Bidang Kesehatan	18.476.234.110	18.642.100.727	-0,89
3	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	7.832.724	69.600	11153,91
4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	45.729.627	20.635.833	121,60
5	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	8.250.000	-	#DIV/0!
6	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	519.000	-	#DIV/0!
Jumlah		18.538.046.461	18.770.861.724	-1,24

Realisasi

B.2 Belanja

Belanja Negara
Rp34.624.274.322

Realisasi Belanja instansi pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp34.624.274.322 atau 94,33% dari anggaran belanja sebesar Rp 36.705.261.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

Uraian	TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	10.974.903.000	10.899.676.782	99,31
Belanja Barang	14.856.324.000	13.415.908.335	90,30
Belanja Modal	10.874.034.000	10.757.289.242	98,93
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	36.705.261.000	35.072.874.359	95,55
Pengembalian		(448.600.037)	-
Jumlah	36.705.261.000	34.624.274.322	94,33

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar 14,95% dibandingkan realisasi belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	10.894.606.354	10.897.768.188	(0,03)
Belanja Barang	12.972.378.726	11.386.839.704	13,92
Belanja Modal	10.757.289.242	7.836.533.411	37,27
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	34.624.274.322	30.121.141.303	14,95

Belanja
Pegawai
Rp10.894.606.
354

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.894.606.354 dan Rp10.897.768.188. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 0,03 persen dari Tahun Anggaran 2022.

Perbandingan Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	3.627.557.700	3.701.620.400	(2,00)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	51.219	53.497	(4,26)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	304.615.030	304.398.720	0,07
Belanja Tunj. Anak PNS	83.204.472	87.302.276	(4,69)
Belanja Tunj. Struktural PNS	23.580.000	25.200.000	(6,43)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	181.460.000	185.850.000	(2,36)
Belanja Tunj. PPh PNS	28.732.535	29.718.517	(3,32)
Belanja Tunj. Beras PNS	218.853.240	226.457.340	(3,36)
Belanja Uang Makan PNS	364.566.000	397.075.000	(8,19)
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	554.500.000	571.525.000	(2,98)
Belanja Tunjangan Umum PNS	147.370.000	152.785.000	(3,54)
Belanja Gaji Pokok PPPK	76.995.300	0	#DIV/0!
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.122	0	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	7.699.530	0	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Anak PPPK	2.073.876	0	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	10.980.000	0	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.735.060	0	#DIV/0!
Belanja Uang Makan PPPK	9.038.000	0	#DIV/0!
Belanja Uang Lembur	65.034.000	39.239.000	65,74
Belanja Uang Lembur PPPK	-	0	#DIV/0!
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	5.081.427.880	5.176.543.438	(1,84)
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	105.201.818	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	10.899.676.782	10.897.768.188	0,02
Pengembalian Belanja Pegawai	(5.070.428)	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	10.894.606.354	10.897.768.188	(0,03)

Belanja
Barang
Rp12.972.378.726

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12.972.378.726 dan Rp11.386.839.704. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 13,92% dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2.370.912.862	3.085.621.165	(23,16)
Belanja Barang Non Operasional	1.634.209.633	1.306.952.475	25,04
Belanja Jasa	1.810.531.310	814.877.470	122,18
Belanja Pemeliharaan	1.874.598.603	1.593.373.695	17,65
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.725.655.927	4.827.204.878	18,61
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	13.415.908.335	11.628.029.683	15,38
Pengembalian Belanja	(443.529.609)	(241.189.979)	83,89
Jumlah Belanja	12.972.378.726	11.386.839.704	13,92

Pada Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 terdapat Realisasi Belanja untuk Penanganan Pandemi Covid 19 yang terdiri dari:

Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Penanganan Pandemi Covid 19 TA 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI ANGGARAN
1	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	2.220.000	2.220.000	100,00
	Jumlah Belanja	2.220.000	2.220.000	100,00

1. Belanja barang Persediaan – Penanganan Pandemi Covid 19 sebesar Rp2.220.000,- merupakan realisasi belanja Pengadaan Bahan Habis Pakai Pandemi Covid 19 TA 2023 berupa Masker/Hand Sanitizer/Cairan Desinfektan/Sarung Tangan.

Perbandingan Belanja Barang dan Jasa
Penanganan Pandemi Covid 19 TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	48.048.000	(100,00)
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	2.220.000	36.049.825	(93,84)
Jumlah Belanja	2.220.000	84.097.825	(97,36)

Belanja Modal **B.5 Belanja Modal**

Rp10.757.289.2

42

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.757.289.242 dan Rp7.836.533.411. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar 37,27% dibandingkan Tahun Anggaran 2022, hal ini dikarenakan anggaran Belanja Modal TA 2023 nilainya meningkat dibandingkan anggaran Belanja Modal TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,727,197,253	7,152,299,998	49.98
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	577,803,590	(100.00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	67,500,000	(100.00)
Belanja Modal Lainnya	30,091,989	38,929,823	(22.70)
Jumlah Belanja Kotor	10,757,289,242	7,836,533,411	37.27
Pengembalian	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	10,757,289,242	7,836,533,411	37.27

Belanja Modal **B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Tanah Rp0

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Belanja Modal **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan
Mesin

Rp10.727.197.2

53

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp10.727.197.253, mengalami peningkatan sebesar 49,96 persen bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.152.299.998. Hal ini disebabkan

meningkatnya anggaran dan realisasi pengadaan belanja modal peralatan dan mesin TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja
Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Alat Pengujian dan Kalibrasi	9.838.147.253	6.716.800.000	46,47
Kendaraan Bermotor	320.000.000	0	#DIV/0!
Pengolah Data	309.910.000	213.500.000	45,16
Jaringan LAN dan WIFI	0	0	#DIV/0!
Inventaris Kantor	259.140.000	143.799.998	80,21
Rak Arsip	0	78.200.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	10.727.197.253	7.152.299.998	49,98
Pengembalian	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	10.727.197.253	7.152.299.998	49,98

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin –
Penanganan
Pandemi
COVID-19 Rp0

B.5.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin –
Penanganan Pandemi COVID-19

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0. Hal ini disebabkan tidak ada anggaran untuk pengadaan alat pengujian dan kalibrasi (akun covid) – PEN pada Tahun Anggaran 2023.

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0

B.5.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pada tahun anggaran 2023 tidak ada anggaran untuk belanja modal gedung dan bangunan.

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp0 **B.5.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pada tahun anggaran 2023 tidak ada anggaran untuk belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Belanja Modal Lainnya Rp30.091.989 **B.5.6 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp30.091.989 dan Rp38.929.823. Realisasi belanja modal lainnya merupakan realisasi pengadaan dokumen acuan metode kerja BPFK Surabaya TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Dokumen Acuan Metode Kerja	30,091,989	38,929,823	(29.37)
Jumlah Belanja Kotor	30,091,989	38,929,823	(29.37)
Pengembalian	-	-	0.00
Jumlah Belanja	30,091,989	38,929,823	(29.37)

Belanja Bantuan Sosial Rp0. **B.5.7 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31-Dec-23	31-Dec-22
Kuitansi yang belum di GU	-	-
Uang di Rekening Bank	-	-
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas Bendahara Penerimaan di Bank Mandiri No acc. 1420004582184	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya
dan Setara
Kas
Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp238.625.568. Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 merupakan Pendapatan Jasa Pengujian, sertifikasi, Kalibrasi, dan standardisasi di Bidang Kesehatan yang belum disetor ke negara sampai dengan 31 Desember 2022.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas Lainnya dan Setara Kas di Rekening Bendahara Penerimaan pada Bank Mandiri No acc. 1420004582184	-	238,625,568
Jumlah	-	238,625,568

Piutang PNB
Rp664.353.500

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp664.353.500 dan Rp1.405.981.600. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang PNB per 31 Desember 2023 BPFK Surabaya terdiri dari Piutang Kalibrasi dan TLD Badge.

Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBK Per 31 Desember 2023
dan Per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Kalibrasi	165,685,900	289,813,800
Film Badge	-	12,075,000
TLD Badge	498,667,600	1,104,092,800
Piutang Garansi Bank	-	-
Piutang Jaminan Pelaksanaan	-	-
Jumlah	664,353,500	1,405,981,600

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Bukan
Pajak
Rp644.353.50
0

C.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan
Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp644.353.500 dan Rp644.375.795.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
Per 31 Desember 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	664,353,500	100%	664,353,500
Jumlah	664,353,500		664,353,500
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	664,353,500	-	664,353,500

Persediaan

Rp807.595.192

C.6 Persediaan

Nilai Persediaan Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp807.595.192 dan Rp722.618.353.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan
Per 31 Des 2023 dan Per 31 Des 2022

Jenis	31 Des 2023	31 Des 2022
Barang Konsumsi	748.478.222	662.577.136
Barang untuk Pemeliharaan	51.832.355	51.208.707
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya/Bahan Baku	7.284.615	8.832.510
Jumlah	807.595.192	722.618.353

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Peralatan dan

Mesin

Rp93.749.850.03

7

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp93.749.850.037 dan Rp83.284.048.534. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	83.284.048.534
Mutasi tambah:	
Pembelian	10.727.197.253
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	261.395.750
Saldo per 31 Desember 2023	93.749.850.037
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	(70.209.062.411)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	23.540.787.626

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin TA 2022 berupa :

No	Nama	Jenis Peralatan dan Mesin	Jumlah	Nilai
1	Flow Analyzer	Alat Kalibrasi	1.0 UNIT	94.000.000
2	Multiflow / IDA	Alat Kalibrasi	1.0 UNIT	70.000.000
3	Patien Simulator Analyzer	Alat Kalibrasi	1.0 UNIT	144.300.000
4	NIBP Monitor	Alat Kalibrasi	1.0 UNIT	79.420.000
5	SPO2 Simulator	Alat Kalibrasi	1.0 UNIT	43.626.000
6	Digital Manometer	Alat Kalibrasi	1.0 UNIT	14.500.000
7	ECG Simulator	Alat Kalibrasi	1.0 UNIT	31.020.000
8	Defibrilator Analyzer	Alat Kalibrasi	1.0 UNIT	110.850.000
9	Electrical Safety Analyzer	Alat Kalibrasi	1.0 UNIT	32.190.000
10	Reference Thermometer	Alat Kalibrasi	1.0 UNIT	116.994.000
11	Phantom Bondensitometer	Alat Kalibrasi	1.0 UNIT	119.880.000
12	Chamber Detektor 0.35 cm3	Alat Kalibrasi	1.0 UNIT	192.250.000
13	Anak Timbangan M1 10 KG	Alat Kalibrasi	2.0 UNIT	55.882.000
14	Anak Timbangan M1 20 KG	Alat Kalibrasi	4.0 UNIT	142.376.000
15	SPO2 Simulator	Alat Kalibrasi	1.0 UNIT	43.626.000
16	O2 Analyzer	Alat Kalibrasi	3.0 UNIT	88.901.676
17	Laptop	Alat Pengolah Data	6.0 UNIT	156.000.000
18	Laptop -IT	Alat Pengolah Data	2.0 UNIT	63.400.000
19	PC Dekstop / All In One PC	Alat Pengolah Data	1.0 UNIT	20.620.000
20	Multifunction Printer	Alat Pengolah Data	1.0 UNIT	5.870.000
21	Printer Label	Alat Pengolah Data	1.0 UNIT	3.620.000
22	Scanner	Alat Pengolah Data	4.0 UNIT	60.400.000
23	Pengadaan Kendaraan Roda 4/Minibus Operasional Kantor dan/atau Lapangan (Jawa Timur)	Kendaraan Fungsional Pelayanan	1.0 UNIT	320.000.000
24	Handphone untuk Pelayanan Teknis	Inventaris Kantor	2.0 UNIT	7.580.000
25	Harddisk Server 2,4 TB	Inventaris Kantor	2.0 UNIT	12.600.000
26	Dispenser	Inventaris Kantor	1.0 UNIT	2.275.000
27	Koper Alat Kecil	Inventaris Kantor	1.0 UNIT	4.000.000
28	Lemari Alat	Inventaris Kantor	2.0 UNIT	6.500.000
30	Lemari Loker 15 Pintu	Inventaris Kantor	1.0 UNIT	4.300.000
31	Lemari Arsip	Inventaris Kantor	1.0 UNIT	3.250.000
32	Meja Kerja Kubikal - 2 staf	Inventaris Kantor	6.0 SET	83.700.000
33	Kursi Staff Beroda Besar	Inventaris Kantor	13.0 UNIT	20.800.000
34	Kursi Staff Beroda Kecil	Inventaris Kantor	2.0 UNIT	2.160.000
35	AC 2 PK	Inventaris Kantor	3.0 UNIT	25.350.000
36	AC 1 PK	Inventaris Kantor	1.0 UNIT	4.600.000
37	Koper Alat Besar	Inventaris Kantor	5.0 UNIT	21.000.000
38	Troly Alat Datang	Inventaris Kantor	3.0 UNIT	7.875.000
39	Sofa	Inventaris Kantor	2.0 SET	40.200.000
40	LCD Proyektor	Inventaris Kantor	1.0 UNIT	6.800.000
41	Mesin Foging	Inventaris Kantor	2.0 UNIT	2.000.000
42	Mesin Pemotong Rumput	Inventaris Kantor	1.0 UNIT	1.750.000
43	Tripod Camera	Inventaris Kantor	1.0 UNIT	2.400.000
44	Doppler Flow Phantom	Alat Kalibrasi	2.0 UNIT	762.568.828
45	Safety Analyzer with Printer	Alat Kalibrasi	1.0 UNIT	110.000.000
46	Thermohygrobarometer	Alat Kalibrasi	5.0 UNIT	66.200.735
47	Gas Flow Analyzer	Alat Kalibrasi	4.0 UNIT	1.743.313.360
48	Flow Analyzer	Alat Kalibrasi	2.0 UNIT	430.900.000
49	Climatic Chamber	Alat Kalibrasi	1.0 UNIT	1.737.705.000
50	Phototherapy Radiometer	Alat Kalibrasi	2.0 UNIT	128.752.364
51	USG Phantom	Alat Kalibrasi	4.0 UNIT	382.178.356
52	Spektrochromameter	Alat Kalibrasi	5.0 UNIT	250.427.130
53	Temperature Datalogger	Alat Kalibrasi	4.0 UNIT	75.547.916

No	Nama	Jenis Peralatan dan Mesin	Jumlah	Nilai
54	Anak Timbangan 20Kg F1	Alat Kalibrasi	4.0 UNIT	160.822.056
55	Anak Timbangan 10Kg F1	Alat Kalibrasi	4.0 UNIT	81.492.504
56	Anak Timbangan 5Kg F1	Alat Kalibrasi	2.0 UNIT	24.015.160
57	Anak Timbangan 2Kg F1	Alat Kalibrasi	4.0 UNIT	34.289.196
58	Anak Timbangan 1Kg F1	Alat Kalibrasi	4.0 UNIT	21.756.780
59	Syringe Calibrator 1Lt	Alat Kalibrasi	2.0 UNIT	43.165.440
60	Syringe Calibrator 3Lt	Alat Kalibrasi	2.0 UNIT	26.860.224
61	SPO2 Simulator	Alat Kalibrasi	2.0 UNIT	87.252.000
62	Infusion Analyzer	Alat Kalibrasi	2.0 UNIT	364.300.000
63	Fetal Doppler Simulator	Alat Kalibrasi	2.0 UNIT	203.911.512
64	ESU Analyzer	Alat Kalibrasi	2.0 UNIT	342.100.000
65	ECG Simulator	Alat Kalibrasi	2.0 UNIT	62.040.000
66	Defibrillator Analyzer	Alat Kalibrasi	2.0 UNIT	251.080.000
67	NIBP Simulator	Alat Kalibrasi	2.0 UNIT	237.600.000
68	Incubator Analyzer	Alat Kalibrasi	2.0 UNIT	543.453.016
69	Vital Sign Simulator	Alat Kalibrasi	2.0 UNIT	286.600.000
JUMLAH			159 UNIT	10.727.197.253

Mutasi kurang peralatan dan mesin TA 2023 senilai Rp 261.395.750 adalah reklasifikasi dari aset tetap ke aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan yang terdiri dari :

- a. 20 Unit Komputer senilai Rp198.595.750
- b. 34 Unit Peralatan Komputer senilai Rp62.800.000

Gedung dan Bangunan
Rp9.743.982.390

C.8 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Des 2022 adalah Rp9.743.982.390 dan Rp9.743.982.390. Tidak ada mutasi penambahan atau pengurangan nilai gedung dan bangunan pada tahun anggaran 2023.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp67.500.000

C. 9 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Des 2022 adalah Rp67.500.000 dan Rp67.500.000. Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang terhadap transaksi Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan.

Aset Tetap
Lainnya
Rp298.284.814
4

C. 10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp298.284.814 dan Rp268.192.825. Terdapat mutasi tambah atas aset tetap lainnya ini sampai dengan 31 Desember 2022 berupa Dokumen Acuan Metode Kerja sebesar Rp38.929.823.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	268.192.825
Mutasi tambah:	
Dokumen Acuan Metode Kerja	30.091.989
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	298.284.814
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	298.284.814

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp599.772.000

C.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp599.772.000 dan Rp599.772.000 yang merupakan nilai dari Perencanaan pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu 3 Lantai BPFK Surabaya yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca per 31 Desember 2013. KDP tersebut sudah dinyatakan untuk tidak dilanjutkan pekerjaannya oleh KPA melalui surat pernyataan Tanggal 30 Maret 2017.

No	URAIAN	LOKASI	NO KONTRAK	NILAI KONTRAK	% Pengerjaan	NILAI Pengerjaan	KET
1	Gedung 3 Lt Terpadu	Surabaya	PL.00.06.02.1.3.24	635,965,000	80%	599,772,000	RM

Berikut kami sajikan kronologis pembangunan gedung laboratorium terpadu 3 lantai yang tidak dapat terlaksana :

**KRONOLOGI PEMBANGUNAN GEDUNG
LABORATORIUM TERPADU 3 (Tiga) Lantai
Pada BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS
KESEHATAN SURABAYA**

Sehubungan dengan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu 3 lantai BPAFK Surabaya yang tercantum pada DIPA Modal BPFK Surabaya Tahun Anggaran 2013 output 2051.998. (Gedung/Bangunan) senilai Rp. 28.500.000.000,- dapat kami laporkan bahwa pembangunannya tidak terlaksana pada Tahun Anggaran 2013. Adapun penjelasan untuk hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan dengan uraian sebagai berikut :

1. Perhitungan sisa waktu pelaksanaan yang tersedia untuk pembangunan fisik gedung tinggal 3,5 bulan :
 - a. Diperlukan waktu 1,5 bulan untuk retender konsultan pengawas terhitung sejak awal September 2013,
 - b. Diperlukan waktu 1 bulan untuk tender fisik terhitung sejak awal September 2013,
 - c. Sisa waktu yang masih bisa dilaksanakan untuk pembangunan gedung 2 bulan (tidak terjadi retender fisik)
2. Dengan asumsi sisa waktu seperti tersebut diatas, konstruksi fisik yang kemungkinan masih bisa dilaksanakan :
 - a. Alternatif -1
 - Pekerjaan Persiapan dan pembersihan lokasi,
 - Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang Ø 30 cm kedalaman 12 m untuk seluruh titik pondasi,
 - Galian Tanah untuk Pile Cap dan Sebagian Balok Sloof
 - Pekerjaan Beton Pile Cap dan sebagian Sloof
 - Biaya terserap Rp. 1.875.772.286,28

b. Alternatif -2

- Pekerjaan Persiapan dan pembersihan lokasi,
- Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang Ø 30 cm kedalam 12 m untuk seluruh titik pondasi,
- Galian Tanah untuk Pile Cap dan Sebagian Balok Sloof
- Pekerjaan sebagian Beton Pile Cap dan Sloof
- Sebagian pemasangan Kolom dan balok dari Baja WF.
- Pekerjaan beton plat lantai 2
- Biaya terserap Rp. 3.550.574.062,66

3. Faktor kesulitan pelaksanaan alternatif tersebut adalah :

a. Waktu Pemesanan Material Tiang Pancang diperkirakan 1 bulan (bila material ready stock dan proses pengeringan umur beton cukup), dan pelaksanaan pemancangan diperkirakan 1 bulan dan secara simultan juga dilaksanakan pekerjaan pile cap. Dari keseluruhan proses tersebut memakan waktu sekitar 2.5 bulan. Belum lagi kalau terjadi kelangkaan bahan material dan Mesin Pancang Injection sehingga dikuatirkan kontraktor tidak bisa melanjutkan tahap Pekerjaan berikutnya.

b. Dengan kemungkinan keterserapan hanya dibawah Rp. 5.000.000.000,- maka sesuai dengan Perpres 70/Tahun 2012, proses PELELANGAN FISIK akan diikuti oleh Kontraktor Grid KECIL dengan sistem PASCA KUALIFIKASI. Sehingga kemungkinan akan banyak mengalami kesulitan baik secara financial maupun manajemen proyek karena kemampuan kontraktor belum bisa melaksanakan pondasi sekompleks pondasi Gedung ini (Gedung berlantai 3 dengan persyaratan khusus untuk laboratorium).

c. Proses penyediaan material kemungkinan juga akan memerlukan waktu inden sehingga dapat mempengaruhi penyelesaian volume pekerjaan secara keseluruhan.

d. Kondisi lokasi dilapangan yang cukup sempit

terutama untuk manuver alat/mesin pancang maka metode pelaksanaan harus dimulai dari sisi selatan ke utara .

- e. Dengan sisa waktu yang tersedia, mempertimbangkan alternatif pembangunan fisik yang mungkin dapat dilaksanakan dan tidak tersedianya anggaran pembangunan fisik Tahun Anggaran 2014, maka progres pembangunan gedung akan terkendala/terhenti.

Apabila gedung eksisting dibongkar tanpa diikuti pembangunan paripurna, maka kondisi pelayanan akan terhenti (tidak memenuhi standart laboratorium) mengingat gedung yang akan dibangun menempati lahan yang digunakan untuk operasional kegiatan laboratorium.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp71.584.840.01
1*

C.12 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp71.584.840.011 dan Rp65.722.531.807. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	93.749.850.037	70.209.062.411	23.540.787.626
2	Gedung dan Bangunan	9.743.982.390	1.372.402.595	8.371.579.795
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.500.000	3.375.005	64.124.995
4	Aset Tetap Lainnya	298.284.814	0	298.284.814
Akumulasi Penyusutan		103.859.617.241	71.584.840.011	32.274.777.230

Aset Tak
Berwujud
Rp936.077.202

C.13 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp936.077.202 dan Rp936.077.202.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang aset tak berwujud sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Aset Lain-Lain
Rp330.424.510

C.14 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp330.424.510 dan Rp69.028.760. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Mutasi tambah aset lain-lain sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 berasal dari reklasifikasi aset tetap ke aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan yang terdiri dari :

- 20 Unit Komputer senilai Rp198.595.750
- 34 Unit Peralatan Komputer senilai Rp62.800.000

Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp1.266.501.712

C.15 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp1.266.501.712 dan Rp1.005.105.962. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud lainnya	0	0	0
Software	936.077.202	936.077.202	0
Jumlah	936.077.202	936.077.202	0
Aset Lain-lain	330.424.510	69.028.760	261.395.750
Jumlah	1.266.501.712	1.005.105.962	261.395.750

Uang Muka
dari KPPN Rp0

C.16 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp47.097.867

C.17 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp47.097.867 dan Rp283.395.109. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya

dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

RincianUtang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Listrik yang Masih Harus Dibayar	45.105.329	Belanja listrik bulan Desember 2023
Belanja Telpn yang Masih Harus Dibayar	357.078	Belanja telepon bulan Desember 2023
Belanja Air yang Masih Harus Dibayar	1.635.460	Belanja air bulan Desember 2023
Total	47.097.867	

Ekuitas

Rp33.635.046.555

C.18 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp33.635.046.555 dan Rp29.680.418.559. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP
Rp17.742.957.
734

D.PENJELASAN
OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.742.957.734 dan Rp18.503.968.827. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

URAIAN	31-Des-23	31-Des-22	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	17.734.606.010	18.503.899.227	(4,16)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	519.000	69.600	645,69
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	7.832.724	0	#DIV/0!
Jumlah	17.742.957.734	18.503.968.827	(4,11)

Pendapatan Negara Bukan Pajak merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pelaksanaan pengujian dan kalibrasi ke Fasyankes.

Nilai Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan pada LRA Pendapatan TA 2023 adalah sebesar Rp18.476.234.110. Sedangkan nilai Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan pada LO TA 2023 adalah sebesar Rp17.734.606.010. Rincian nilai Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

AKUN	URAIAN	Realisasi Menurut		SELISIH
		Laporan Realisasi Pendapatan TA 2023	LO TA 2023	
425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	18.476.234.110	17.734.606.010	741.628.100
Jumlah		18.476.234.110	17.734.606.010	741.628.100

Jika realisasi Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan pada

Laporan Operasional TA 2023 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan pada Laporan LRA Pendapatan TA 2023 terdapat selisih sebesar Rp138.201.500. Selisih tersebut berasal dari jurnal manual akun Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan selama periode 2023 dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	DEBET	KREDIT	SELISIH
Jurnal Balik Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2022	1.405.981.600	-	1.405.981.600
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2023	-	664.353.500	(664.353.500)
JUMLAH	1.405.981.600	664.353.500	741.628.100

*Beban
Pegawai
Rp10.894.606.
354*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.894.606.354 dan Rp10.897.768.188. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

URAIAN	31-Des-23	31-Des-22	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.622.487.300	3.701.620.400	(2,14)
Beban Pembulatan Gaji PNS	51.191	53.497	(4,31)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	304.615.030	304.398.720	0,07
Beban Tunj. Anak PNS	83.204.472	87.302.276	(4,69)
Beban Tunj. Struktural PNS	23.580.000	25.200.000	(6,43)
Beban Tunj. Fungsional PNS	181.460.000	185.850.000	(2,36)
Beban Tunj. PPh PNS	28.732.535	29.718.517	(3,32)
Beban Tunj. Beras PNS	218.853.240	226.457.340	(3,36)
Beban Uang Makan PNS	364.566.000	397.075.000	(8,19)
Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	554.500.000	571.525.000	(2,98)
Beban Tunj. Umum PNS	147.370.000	152.785.000	(3,54)
Belanja Gaji Pokok PPPK	76.995.300	0	#DIV/0!
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.122	0	#DIV/0!
PPPK	7.699.530	0	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Anak PPPK	2.073.876	0	#DIV/0!
PPPK	10.980.000	0	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.735.060	0	#DIV/0!
Belanja Uang Makan PPPK	9.038.000	0	#DIV/0!
Beban Uang Lembur	65.034.000	39.239.000	65,74
Belanja Uang Lembur PPPK	-	0	#DIV/0!
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	5.081.427.880	5.176.543.438	(1,84)
egiatan/Kinerja PPPK	105.201.818	0	#DIV/0!
Jumlah	10.894.606.354	10.897.768.188	(0,03)

Nilai realisasi belanja Pegawai pada LRA TA 2023 adalah sebesar Rp10.894.606.354, sedangkan beban Pegawai pada Laporan Operasional (LO) TA 2023 adalah Rp10.894.606.354. Adapun rinciannya sebagai berikut:

URAIAN	LRA TA 2023	LO TA 2023	SELISIH
Beban Gaji Pokok PNS	3.622.487.300	3.622.487.300	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	51.191	51.191	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	304.615.030	304.615.030	0
Beban Tunj. Anak PNS	83.204.472	83.204.472	0
Beban Tunj. Struktural PNS	23.580.000	23.580.000	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	181.460.000	181.460.000	0
Beban Tunj. PPh PNS	28.732.535	28.732.535	0
Beban Tunj. Beras PNS	218.853.240	218.853.240	0
Beban Uang Makan PNS	364.566.000	364.566.000	0
Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	554.500.000	554.500.000	0
Beban Tunj. Umum PNS	147.370.000	147.370.000	0
Belanja Gaji Pokok PPPK	76.995.300	76.995.300	0
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.122	1.122	0
PPPK	7.699.530	7.699.530	0
Belanja Tunjangan Anak PPPK	2.073.876	2.073.876	0
PPPK	10.980.000	10.980.000	0
Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.735.060	6.735.060	0
Belanja Uang Makan PPPK	9.038.000	9.038.000	0
Beban Uang Lembur	65.034.000	65.034.000	0
Belanja Uang Lembur PPPK	-	-	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	5.081.427.880	5.081.427.880	0
egiatan/Kinerja PPPK	105.201.818	105.201.818	0
Jumlah	10.894.606.354	10.894.606.354	0

Beban
Persediaan
Rp521.548.362

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp521.548.362 dan Rp Rp376.299.918. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

URAIAN	31-Des-23	31-Des-22	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	496.969.087	357.407.213	39,05
Beban Persediaan Bahan Baku	24.579.275	18.892.705	30,10
Beban Persediaan Lainnya	-	0	#DIV/0!
Jumlah	521.548.362	376.299.918	38,60

Realisasi Belanja Persediaan per 31 Desember 2023 menurut LRA TA 2023 sebesar Rp800.505.403. Sedangkan menurut Laporan Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp521.548.362. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Persediaan dicatat sebagai perolehan Persediaan di Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupakan pemakaian Persediaan sampai dengan 31 Desember 2023. Rincian perolehan nilai beban persediaan pada Laporan Operasional TA 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo awal persediaan TA 2023	722,618,353
Penambahan:	
- Pembelian /Realisasi Belanja Persediaan TA 2023	800,505,403
- Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-
- Koreksi Nilai Persediaan	-
Pengurangan:	
- Persediaan TA 2023	807,595,192
- Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-
- Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	87,452,402
- Beban Persediaan Suku Cadang	106,527,800
Jumlah	521,548,362

Beban Barang
dan Jasa
Rp5.017.476.7
28

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.017.476.728 dan Rp4.583.350.877. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022
Pada Laporan Operasional

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1,481,504,937	2,286,097,691	(35.20)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	422,876,400	492,134,274	(14.07)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	86,242,525	83,169,200	3.70
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	214,920,000	214,920,000	0.00
Beban Barang Operasional Lainnya	165,369,000	9,300,000	1678.16
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	#DIV/0!
Beban Bahan	124,304,330	165,197,100	(24.75)
Beban Honor Output Kegiatan	60,960,000	58,760,000	3.74
Beban Barang Non Operasional Lainnya	648,439,900	403,035,660	60.89
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19	0	48,048,000	(100.00)
Beban Langganan Listrik	509,322,981	453,972,172	12.19
Beban Langganan Telepon	5,647,263	5,006,975	12.79
Beban Langganan Air	14,464,320	8,115,340	78.23
Beban Sewa	18,000,000	14,925,000	20.60
Beban Jasa Profesi	81,150,000	39,000,000	108.08
Beban Jasa Lainnya	1,184,275,072	301,669,465	292.57
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid 19	0	0	#DIV/0!
Jumlah	5,017,476,728	4,583,350,877	9.47

Realisasi belanja Barang dan Jasa pada LRA TA 2023 adalah sebesar Rp4.575.539.395, sedangkan Realisasi belanja Barang dan Jasa pada Laporan Operasional TA 2023 adalah sebesar Rp5.017.476.728. Berikut perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada LRA TA 2023 dan LO TA 2023.

Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa
per 31 Des 2023 Menurut LO dan LRA

URAIAN	LO TA 2023	LRA TA 2023	SELISIH
Beban Keperluan Perkantoran	1,481,504,937	1,481,504,937	-
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	422,876,400	422,876,400	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	86,242,525	86,242,525	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	214,920,000	214,920,000	-
Beban Barang Operasional Lainnya	165,369,000	165,369,000	-
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	-
Beban Bahan	124,304,330	124,304,330	-
Beban Honor Output Kegiatan	60,960,000	60,960,000	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	648,439,900	648,439,900	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19	0	0	-
Beban Langganan Listrik	509,322,981	507,512,982	1,809,999
Beban Langganan Telepon	5,647,263	5,703,136	(55,873)
Beban Langganan Air	14,464,320	13,890,120	574,200
Beban Sewa	18,000,000	18,000,000	-
Beban Jasa Profesi	81,150,000	81,150,000	-
Beban Jasa Lainnya	1,184,275,072	1,184,275,072	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid 19	0	0	-
Jumlah	5,017,476,728	5,015,148,402	2,328,326

Terdapat selisih sebesar Rp2.328.326 dari hasil perbandingan antara realisasi belanja barang dan jasa di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2023 dengan realisasi belanja barang dan jasa di Laporan Operasional (LO) TA 2023. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi Barang dan Jasa TA 2023	5,015,148,402
Penambahan:	
- Langganan Listrik Bulan Desember TA 2023 yang masih harus dibayar	45,105,329
- Langganan Telepon Bulan Desember TA 2023 yang masih harus dibayar	357,078
- Langganan Air Bulan Desember TA 2023 yang masih harus dibayar	1,635,460
Pengurangan:	
- Pembayaran langganan Listrik Bulan Desember TA 2022	(43,295,330)
- Pembayaran Langganan Telepon Bulan Desember TA 2022	(412,951)
- Pembayaran langganan Air Bulan Desember TA 2022	(1,061,260)
Jumlah	5,017,476,728

Beban
Pemeliharaan
Rp2.068.578.805

D.5 Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.068.578.805 dan Rp1.738.880.143. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang

dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	507,916,000	372,881,182	36.21
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,366,682,603	1,220,492,513	11.98
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	87,452,402	34,985,660	149.97
Beban Persediaan Suku Cadang	106,527,800	60,476,360	76.15
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	50,044,428	(100.00)
Jumlah	2,068,578,805	1,738,880,143	18.96

Realisasi belanja Pemeliharaan pada LRA TA 2023 adalah sebesar Rp1.874.598.603, sedangkan Realisasi belanja pemeliharaan pada LO TA 2023 adalah sebesar Rp2.068.578.805. Berikut perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan pada LRA TA 2023 dan LO TA 2023

*Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan
per 31 Des 2023 Menurut LO dan LRA*

URAIAN	LO TA 2023	LRA TA 2023	SELISIH
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	507,916,000	507,916,000	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,366,682,603	1,366,682,603	-
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	87,452,402	0	87,452,402
Beban Persediaan suku cadang	106,527,800	0	106,527,800
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	-
Jumlah	2,068,578,805	1,874,598,603	193,980,202

Terdapat selisih sebesar Rp193.980.202 dari hasil perbandingan antara realisasi belanja pemeliharaan di LRA TA 2023 dengan realisasi belanja barang dan jasa di LO TA 2023. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	87,452,402
Beban Persediaan suku cadang	106,527,800
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	193,980,202

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp5.282.126.318

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.282.126.318 dan Rp4.586.014.899. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	3,683,483,472	3,354,730,342	9.80
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	53,300,000	43,950,000	21.27
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	193,845,109	372,460,430	-47.96
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,351,497,737	814,874,127	65.85
Jumlah	5,282,126,318	4,586,014,899	15.18

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 menurut LRA maupun LO pada periode yang sama adalah sama yakni sebesar Rp5.282.126.318.

Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam

bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban
Bantuan
Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp6.123.703.954

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.123.703.954 dan Rp5.281.630.168. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5,902,453,253	5,060,379,461	16.64
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	219,563,201	219,563,202	(0.00)
Beban Penyusutan Irigasi	1,687,500	1,687,505	0.00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	6,123,703,954	5,281,630,168	15.94

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp19.977.705

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp19.977.705 dan Rp80.681.278. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang PNPB	19,977,705	80,681,278	(75.24)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah	19,977,705	80,681,278	(75.24)

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp53.979.627

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp53.979.627 dan Rp128.691.397. Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 merupakan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp53.979.627. Berikut rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 :

Rincian Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar :	0	108,055,564	(100.00)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	108,055,564	(100.00)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	#DIV/0!
Defisit dari Kegiatan Non Operasional :	53,979,627	20,635,833	161.58
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	45,729,627	20,635,833	121.60
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	8,250,000	0	#DIV/0!
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0	#DIV/0!
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	#DIV/0!
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	53,979,627	128,691,397	(58.05)

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp53.979.627 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu . Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu merupakan Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2022 untuk 25 Pegawai sebesar Rp2.350.859 dan Pengembalian Gaji Induk bln.Agust-Des 2022, Tukin Bulan Agust-Des 2022 dan Uang Makan Bulan Agust-Nov 2022 a.n. Muhammad Hafidh Amaly, Amd (PNS) sebesar Rp43.378.768. Sedangkan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp8.250.000 merupakan penerimaan yang berasal dari pengembalian Lebih Bayar Pengadaan Lisensi Microsoft Office TA 2022.

Pos Luar Biasa **D.12 Pos Luar Biasa**

Rp0 Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal **E.1 Ekuitas Awal**

Rp29.680.418.559 Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 dan 01 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp29.680.418.559 dan Rp27.230.439.111.

Defisit LO **E.2 Surplus (Defisit) LO**

(Rp12.131.080.865) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp12.131.080.865) dan (Rp8.911.965.247). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian **E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Aset Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai **E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan**

Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan sampai

dengan 31 Desember 2023.

<i>Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0</i>	E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
<i>Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0</i>	E.3.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
<i>Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi Rp0</i>	E.3.6 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp11.665.116.
<i>Koreksi Lain-Lain Lain Rp0</i>	E.3.7 Koreksi Lain-Lain Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.
<i>Transaksi Antar Entitas Rp16.085.708.861</i>	E.4 Transaksi Antar Entitas Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp16.085.708.861 dan Rp11.350.279.579. Transaksi antar Entitas adalah

transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(18.538.565.461)
Ditagihkan ke Entitas Lain	34.624.274.322
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	16.085.708.861

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar (Rp18.538.565.461) sedangkan DKEL sebesar Rp34.624.274.322. Ditagihkan dari Entitas Lain (DDEL) sebesar (Rp18.538.565.461) merupakan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama Tahun Anggaran 2023. Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp34.624.274.322 merupakan realisasi anggaran belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara setelah dikurangi pengembalian belanja s.d. 31 Desember 2023.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Ekuitas Akhir

*Rp33.635.046.
555*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp33.635.046.555 dan Rp29.680.418.559. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp33.682.144.422 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp47.097.867.

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH
TANGGAL NERACA**

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Penjelasan atas selisih rekonsiliasi internal piutang TA 2023:

1. Ada beberapa informasi data debitur yang dibutuhkan pada aplikasi SAKTI tidak ada pada database pelanggan BPFK Surabaya.
2. Terdapat beberapa pembayaran yang tidak teridentifikasi asal dan peruntukannya yang mungkin merupakan pelunasan atas piutang yang masih tercatat, jika pencatatan dilakukan pada aplikasi SAKTI, pelunasan tidak dapat dilakukan dari pembayaran tahun sebelumnya.